

Jakarta, 4 Juli 2025

Kepada yth:

Bapak Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartato, MBA., MMT.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Bapak Sugiono, B.Sc., M.BA.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Bapak Rosan Perkasa Roeslani, S.E., MBA.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia

Bapak Dr. Edi Prio Pambudi, S.E., M.A.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kemenko Perekonomian RI

Bapak Djatmiko Bris Witjaksono, S.E., MSIE.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI

Ibu Nugraheni Prasetya Hastuti, S.H., LL.M., M.E.

Direktur Perundingan ASEAN, Kementerian Perdagangan RI

Perihal: Seruan Kelompok masyarakat sipil kepada pemerintah untuk tidak memasukkan ISDS dalam RCEP

Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini dari 15 negara anggota* Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), menyerukan kepada pemerintah RCEP untuk terus mengecualikan Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) dari RCEP.

Setelah pertentangan dari masyarakat sipil dan banyak perdebatan publik, pemerintah sepakat untuk mengecualikan ISDS dari RCEP, yang mulai berlaku untuk semua anggota pada Juni 2023. Terdapat komitmen untuk "memulai diskusi" tentang ISDS dalam waktu dua tahun sejak RCEP mulai berlaku. Namun, tidak ada jadwal dan tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan diskusi, dan keputusan apa pun akan memerlukan konsensus dari semua pemerintah. Kami memahami bahwa diskusi semacam itu akan segera dimulai.

Selama negosiasi RCEP pada Agustus 2016, 94 organisasi masyarakat sipil menulis surat terbuka kepada pemerintah RCEP yang mendesak mereka untuk mengecualikan ISDS dari perjanjian tersebut. Surat tersebut menjelaskan bahwa ISDS adalah sistem yang pada dasarnya tidak seimbang yang memungkinkan investor asing untuk mengklaim jutaan atau bahkan miliaran sebagai kompensasi dari pemerintah jika mereka dapat meyakinkan pengadilan internasional bahwa perubahan hukum atau kebijakan akan mengurangi keuntungan mereka di masa mendatang dan/atau mereka tidak diajak berkonsultasi secara memadai tentang hal itu, bahkan jika perubahan tersebut demi kepentingan publik. Ada peningkatan jumlah kasus ISDS terhadap undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, kesehatan publik, dan lingkungan, serta pemberian miliaran dolar yang sangat merugikan negara-negara berpenghasilan rendah. Pemerintah membatalkan pengaturan ISDS karena dampaknya terhadap keuangan dan kedaulatan nasional mereka.

Saat ini, karena kasus ISDS yang diketahui telah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 1.368, ada lebih banyak penolakan publik dan pemerintah terhadap ISDS, dan lebih banyak bukti yang mendukung pengecualian permanen ISDS dari RCEP.

Tidak ada bukti kuat bahwa perjanjian dengan ISDS menghasilkan peningkatan Investasi Langsung Asing. Ada peningkatan jumlah klaim besar terhadap negara-negara berkembang, dan bahkan negara-negara maju. Pada tahun 2019, Pakistan harus membayar \$US 5,8 miliar kepada perusahaan pertambangan, yang hampir setara dengan pinjaman darurat dari Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis ekonomi Pakistan.

Lebih banyak pemerintah negara berkembang yang menolak pengaturan ISDS. India, India, Afrika Selatan, dan Ekuador telah membatalkan perjanjian investasi lama dengan ISDS. Brasil tidak pernah menyetujui ISDS. Negara-negara pengekspor modal sekarang juga menolak ISDS. Australia dan Selandia Baru memiliki kebijakan yang menentang ISDS. ISDS merupakan ancaman yang berkembang terhadap tindakan pemerintah yang mendesak yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim. Semakin banyak perusahaan bahan bakar fosil yang menggunakan ISDS untuk melawan tindakan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon

Uni Eropa dan Inggris telah menarik diri dari Perjanjian Piagam Energi karena ketentuan ISDS-nya digunakan oleh perusahaan bahan bakar fosil untuk melawan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa ISDS merupakan hambatan utama untuk mengatasi krisis perubahan iklim. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah mengakui bahwa ISDS tidak sejalan dengan transisi global menuju ekonomi berkelanjutan dan rendah karbon serta mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penarikan diri pemerintah secara terkoordinasi dari pengaturan ISDS.

Tren global saat ini terkait persaingan untuk mengamankan pasokan mineral penting bagi transisi energi hijau mendorong perluasan investasi pertambangan ke negara-negara kaya mineral. ASEAN diberkahi dengan sumber daya mineral penting, dan sebagian besar anggotanya telah mengintensifkan upaya mereka untuk memproses mineral-mineral ini guna menambah nilai, daripada mengekspor bahan mentah. Tentu saja, hal ini akan mengkonsolidasikan peran perusahaan multinasional sebagai investor utama dan yang cenderung mendorong lebih banyak aturan perlindungan investasi. Dinamika ini, pada gilirannya, dapat memacu perusahaan-perusahaan multinasional pertambangan besar untuk terlibat dalam upaya lobi, yang bertujuan untuk memasukkan mekanisme ISDS ke dalam proses peninjauan RCEP, khususnya dalam konteks meningkatnya praktik nasionalisme sumber daya di

negara-negara berkembang yang kaya mineral. Gugatan hukum perusahaan pertambangan asing terhadap kebijakan larangan ekspor bahan mentah Indonesia merupakan contoh konkret mengapa Pemerintah ASEAN harus menghindari Mekanisme ISDS.

Di tengah gejolak ekonomi saat ini yang disebabkan oleh penerapan tarif sepihak oleh pemerintahan Trump AS, pemerintah RECP tidak boleh menambah risiko tambahan berupa kemungkinan kasus ISDS.

Mengingat banyaknya bukti yang menentang ISDS, kami meminta semua pemerintah negara anggota untuk terus mengecualikan ISDS dari RCEP.

** Para penandatangan RCEP adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Australia, China, Jepang, Korea, dan Selandia Baru.*

Daftar organisasi yang menandatangani:

Organisasi nasional dari negara-negara RCEP

Greenpeace Aotearoa	Aotearoa New Zealand
Coromandel Watchdog of Hauraki Incorporated	Aotearoa New Zealand
New Zealand Council of Trade Unions Te Kauae Kaimahi	Aotearoa New Zealand
Campaign Against Foreign Control of Aotearoa	Aotearoa New Zealand
Environment and Conservation Organisations of NZ Inc	Aotearoa New Zealand
Endangered Species Foundation of New Zealand	Aotearoa New Zealand
Extinction Rebellion Tāmaki Makaurau	Aotearoa New Zealand
Australian Fair Trade and Investment Network	Australia
Combined Retired Union Members Association	Australia
Pax Christi Australia	Australia
Missionaries of the Sacred Heart Justice and Peace Centre	Australia
ActionAid Australia	Australia
Catholics in Coalition for Justice and Peace	Australia
Australian Nursing & Midwifery Federation	Australia
Migrante Australia in New South Wales	Australia
Union Aid Abroad-APHEDA	Australia
GeneEthics	Australia
Reconciliation for Western Sydney	Australia
Electrical Trades Union	Australia
Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania	Australia
Sutherland Shire Environment Centre	Australia
Oxfam Australia	Australia
The Alliance for Responsible Mining Regulation	Australia
Jubilee Australia Research Centre	Australia
UnionsWA	Australia
Aid/Watch	Australia
New South Wales Retired Teachers' Association	Australia
SEARCH Foundation	Australia
Friends of the Earth Australia	Australia
The Wilderness Society (Australia)	Australia
Maritime Union of Australia	Australia
Currie Country Social Change Indigenous Organisation	Australia

Social Action for Community and Development (SACD)	Cambodia
Indonesia for Global Justice	Indonesia
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia	Indonesia
Kesatuan Perjuangan Rakyat	Indonesia
Puanifesto	Indonesia
Indonesia Aids Coalition	Indonesia
Serikat Petani Indonesia	Indonesia
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)	Indonesia
Resistance and Alternatives to Globalization (RAG)	Indonesia
Sahita Institute	Indonesia
Perkumpulan INISIATIF	Indonesia
FIAN Indonesia	Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia	Indonesia
Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA)/People's Coalition for the Right to Water	Indonesia
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia	Indonesia
Consumers' Association of Penang	Malaysia
Forum Kedaulatan Makanan Malaysia (FKMM)	Malaysia
Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG+)	Malaysia
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth)	Malaysia
Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)	Myanmar
Alyansa Tigil Mina (Alliance to Stop Mining)	Philippines
Kilusan Para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN)	Philippines
Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)	Philippines
IBON International	Philippines
Freedom from Debt Coalition (FDC)	Philippines
Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO)	Philippines
Trade Justice Pilipinas	Philippines
FTA Watch	Thailand

Organisasi internasional dan regional dengan anggota di negara-negara RCEP

Third World Network
 Focus on the Global South
 Transnational Institute
 Public Services International
 Peoples' Health Movement
 International Association of People's
 Lawyers
 Oil Change International
 GRAIN